

## **BERDIRINYA KONGSI DAGANG VOC-BERAKHIRNYA TANAM PAKSA**

### **a. Berdirinya Kongsi Dagang VOC**

Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini boleh dikatakan dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing dalam meraup keuntungan berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antarbangsa, antarkelompok atau kongsi dagang, dalam satu bangsapun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh seperti pada tahun 1600 Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama *East India Company* (EIC). Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur, dikendalikan. Pada tahun 1811 kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara.

Persaingan yang cukup keras juga terjadi di antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antarkongsi Belanda juga akan merugikan Kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan Parlemen Belanda (*Staten Generaal*) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terealisasi empat tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antarkongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie*

(VOC) atau dapat disebut dengan “Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur”. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain untuk: (1) menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda yang telah ada, (2) memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain.

VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut “Dewan Tujuh Belas” (*de Heeren XVII*). Mereka terdiri dari delapan perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas Besar Dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain:

- a) melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara,
- b) membentuk angkatan perang sendiri,
- c) melakukan peperangan,
- d) mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat,
- e) mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri,
- f) mengangkat pegawai sendiri, dan
- g) memerintah di negeri jajahan.

Sebagai sebuah kongsi dagang, dengan kewenangan dan hak-hak di atas, menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara. Dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. VOC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali ekspansinya tahun 1605 VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Victoria.

Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, “Dewan Tujuh Belas” secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dapat Kamu

bayangkan “Dewan Tujuh Belas” yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah barang tentu “Dewan Tujuh Belas” tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari permasalahan ini maka pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan gubernur jenderal. Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk “Dewan Hindia” (*Raad van Indie*). Tugas “Dewan Hindia” ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both (1610-1614). Sebagai gubernur jenderal yang pertama, Pieter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Pieter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal perdagangan. Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti dari Portugis, Inggris, Gujarat/India, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Kemudian pada tahun 1611 Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, guna pembelian sebidang tanah seluas 50x50 *vadem* (satu *vadem* sama dengan 182 cm) yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal Kota Batavia. Di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai dua sebagai tempat tinggal, kantor dan sekaligus gudang. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon



Gambar 7. Gubernur Jenderal VOC pertama, Pieter Booth

Monopoli perdagangan VOC mendapat perlawanan dari penguasa tradisional. Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram menyerang Batavia sebanyak dua kali. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten melawan monopoli VOC, termasuk juga Sultan Hasanudin penguasa Goa Tallo yang menentang monopoli VOC di Sulawesi Selatan.

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal berhasil diungguli. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian/Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial.

Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus "*Dewan Tujuh Belas*" yang

semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan.

Sementara itu para pejabat VOC juga semakin feodal. Pada tanggal 24 Juni 1719 Gubernur Jenderal Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap gubernur jenderal, kepada Dewan Hindia beserta isteri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut, warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan kebesaran. Misalnya kereta ditarik enam ekor kuda, hiasan berwarna emas dan kusir orang Eropa untuk kereta kebesaran gubernur jenderal, sedang untuk anggota dewan hindia kuda yang menarik kereta hanya empat ekor dan hiasannya warna perak. Nampaknya para pejabat VOC sudah gila hormat dan ingin berfoya-foya. Sudah barang tentu ini juga membebani anggaran.

Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Hoorn konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. Untuk menjadi karyawan VOC juga harus dengan

menyogok. Pengurus VOC di Belanda memasang tarif sebesar f 3.500,- bagi yang ingin menjadi pegawai *onderkoopman* (pada hal gaji resmi per bulan sebagai *onderkoopman* hanya f.40,-), untuk menjadi *kapitein* harus menyogok f.2000,- dan begitu seterusnya yang semua telah merugikan uang lembaga. Demikianlah para pejabat VOC terjankit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang VOC semakin berat, sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut. Bahkan ada sebuah ungkapan, VOC kepanjangan dari *Vergaan Onder Corruptie* (tenggelam karena korupsi).

Kebangkrutan VOC dapat dilihat dari data tentang pembagian keuntungan. Sejak berdirinya sampai ahun 1609, VOC tidak membagikan keuntungan pada pemegang saham. Pada tahun 1610, VOC membagikan tiga kali keuntungan sejumlah 132,5%, dan tahun 1611 sebesar 30%. Akan tetapi, yang diterimakan dalam bentuk uang kepada pemegang saham hanya 71,5%, sisanya dibayar dalam bentuk barang. Antara tahun 1611-1619 tidak ada pembagian laba. Pada tahun 1620 dibagikan keuntungan sebesar 37,5%, tetapi untuk keperluan tersebut, VOC harus meminjam uang. Sampai tahun 1644, kalau ada pembagian laba, sebagian selalu dibayar dalam bentuk barang.

Dalam kondisi bangkrut VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut, oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda.

## **b. Penguasaan Inggris di Indonesia**

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: *liberte* (kemerdekaan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorkan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis

menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.

Sementara itu, dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Oleh karena, Republik Bataaf merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.

Kebijakan pemerintahan HW Daendels antara lain adalah

- a. Bidang Birokrasi Pemerintahan
  1. Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan agak masuk ke pedalaman
  2. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping Gubernur Jendral dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat.
  3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda.
- b. Bidang Hukum dan Peradilan
  1. Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu :
    - a. Pengadilan untuk orang Eropa
    - b. Pengadilan untuk orang Pribumi

- c. Pengadilan untuk orang Timur Asing
- 2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran.
- c. Bidang Militer dan Pertahanan
  - 1. Membangun jalan antara Anyer – Panarukan. Jalan ini penting sebagai lalu-lintas pertahanan maupun perekonomian.
  - 2. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab hubungan Belanda dan Indonesia sangat sukar sebab ada blokade Inggris di lautan.
  - 3. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
- d. Bidang Ekonomi dan Keuangan
  - 1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
  - 2. Pajak In Natura (Contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan diperberat.
  - 3. Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
- e. Bidang Sosial
  - 1. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer – Panarukan.
  - 2. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan.
  - 3. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Mulai saat inilah pemerintahan Willem Janssen di Hindia Belanda (Indonesia). Pemerintahan Willem Janssen di Hindia Belanda (Indonesia) cukup singkat, yaitu sekitan 6 bulan. Masa pemerintahan Willem Janssen di Hindia Belanda (Indonesia) yaitu dimulai pada tanggal 15 Mei 1811 sampai 18 September 1811. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelum memerintah Hindia Belanda (Indonesia), Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh

ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811 sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Ketika memerintah di Hindia Belanda (Indonesia), Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.

Namun beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia.

Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya.

Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dengan menyerahnya Janssen kepada Inggris, maka berakhirilah masa pemerintahan republik Bataaf di Hindia Belanda (Indonesia). Pemerintahan Janssen di Hindia Belanda (Indonesia) hanya selama 6 bulan.

Setelah adanya kapitulasi tuntang maka dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Pada tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa di Hindia Belanda. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip. Prinsip Raffles yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat.

Tidak lama kemudian Jawa diduduki oleh Inggris pada tahun 1811. Zaman pendudukan Inggris ini hanya berlangsung selama lima tahun, yaitu tahun 1811

sampai 1816, akan tetapi selama waktu ini telah diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang pada 1816 kembali mengambil-alih kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris.

Azas-azas pemerintahan sementara Inggris ini ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles, yang sangat dipengaruhi oleh penguasaan Inggris di India. Pada hakekatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda (VOC) dalam rangka kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. Secara konkrit Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya para petani. Kepada para petani ini Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha.

Sistem sewa tanah diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles setelah mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun (1811-1816) dengan membawa perubahan berasas liberal. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya.

Thomas Stamford Raffles adalah letnan gubernur Inggris pertama yang memerintah di Hindia Belanda. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan *contingenten* diganti dengan sistem sewa tanah (*landrent*). Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah.

Sebelum Inggris memerintah di Jawa, sebenarnya terdapat sejumlah usulan dan percobaan dilakukan oleh Belanda untuk mengubah sistem yang ada di Jawa. Akan tetapi, sistem sewa tanah dinyatakan berasal dari Raffles.

Sewa tanah didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada. Tanah disewakan kepada kepala-kepala desa di

seluruh Jawa yang pada gilirannya bertanggungjawab membagi tanah dan memungut sewa tanah tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, Raffles mengubah pikirannya tentang pemungutan berdasarkan desa menjadi pemungutan yang secara langsung berhubungan dengan penanam perseorangan. Dengan demikian, dalam sistem sewa tanah, rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara.

Pada awalnya, sewa tanah dapat dibayar dalam bentuk uang atau barang, tetapi dalam perkembangannya lebih banyak berupa pembayaran uang.

Pokok-pokok kebijakan Raffles secara umum sebagai berikut.

1. Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan.
2. Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati.
3. Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah.

Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan. Kesejahteraan hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa.

Kegagalan sistem sewa tanah

Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan, karena: (1) sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda, (2) sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah, (3) terbatasnya jumlah pegawai, dan (4) masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang.

Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen.

Dalam bidang ekonomi, Raffles menetapkan kebijakan berupa: (1) menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/ pajak/penyerahan diganti dengan

sistem sewa tanah (*landrente*), (2) semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa

Sementara itu, kebijakan Raffles di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial adalah: (1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Surakarta, (2) Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan, (3) melarang perdagangan budak. Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa: (1) mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia, (2) Raffles bersama asistennya, Arnoldi, berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah *Rafflesia Arnoldi*, dan (3) Raffles menulis buku "History of Java" dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.

### **c. Kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda**

Penguasaan Inggris atas Indonesia berakhir tahun 1816 dengan ditandai Perundingan London (*Convention of London*). Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Walaupun memerintah hanya sebentar, gagasan-gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi kolonial yang baru, terutama yang bertalian dengan sewa tanah, telah sangat mempengaruhi pandangan dari pejabat-pejabat pemerintahan Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik atas pulau Jawa dari pemerintah Inggris. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826) dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1830).

Sistem sewa tanah baru dihapuskan dengan kedatangan seorang Gubernur Jenderal yang baru, bernama Van den Bosch, pada tahun 1830 yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien. Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*), merupakan peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal

Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku dipasar ekspor, khususnya tebu, tarum (nila) dan kopi. Hasil tanaman ini nantinya harus dijual kepada pemerintah belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan Penduduk desa yang tidak punya tanah harus bekerja selama 75 hari setiap tahun (20% dari 365 Hari) pada perkebunan milik pemerintah belanda, hal tersebut menjadi semacam pengganti pajak bagi rakyat. Penduduk dipaksa bekerja di perkebunan milik pemerintah kolonial. Namun pada kenyataannya peraturan Sistem Tanam Paksa bisa dikatakan tidak sesuai karena pada prakteknya seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman yang laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Kolonial. Tanah yang digunakan untuk praktik Tanam Paksa pun masih dikenakan pajak (seharusnya bebas pajak). Sedangkan warga yang tidak mempunyai lahan pertanian harus bekerja selama setahun penuh (seharusnya hanya 66 hari) di lahan pertanian Belanda.

Latar Belakang munculnya kebijakan Tanam Paksa diawali pada tahun 1830 saat pemerintah Belanda hampir bangkrut setelah terlibat Perang Diponegoro (1825-1830), kemudian Gubernur Jenderal Judo mendapat izin untuk menjalankan *Cultuurstelsel* (sistem Tanam Paksa) dengan tujuan utama untuk menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan dan mengisi kas pemerintahan jajahan yang saat itu kosong. Untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, kemudian Johannes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang. Dengan kata lain, Van den Bosch diminta untuk berbuat agar tanah jajahan menjadi wilayah yang menguntungkan. Untuk menjalankan tugas yang berat tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Ia mengorganisasi perkebunan-perkebunan negara dengan hasil panen yang dapat diekspor, seperti gula, kopi, nila, teh, dan lain-lain.

Awal adanya Sistem tanam paksa karena pemerintah kolonial beranggapan bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah kolonial, yang seharusnya diperhitungkan (membayar) senilai 40% dari hasil panen utama desa. kemudian Van den Bosch menginginkan setiap desa menyisihkan sebagian

tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor Eropa (tebu, nila dan kopi). Penduduk kemudian diwajibkan untuk menggunakan sebagian tanah pertaniannya (minimal 20% atau seperlima luas) dan menyisihkan sebagian hari kerja (66 hari dalam setahun) untuk bekerja bagi pemerintah. Dengan menjalankan tanam paksa, Pemerintah Kolonial beranggapan desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya. Seandainya pendapatan desa dari penjualan komoditas ekspor itu lebih besar dari pajak tanah yang harus dibayar, desa akan mendapat kelebihannya. Namun jika kurang, desa harus membayar kekurangannya. Oleh karena itu, Van den Bosch mengerahkan rakyat jajahannya untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor. Berikut Sistem yang disusun Van den Bosch Setibanya di Indonesia (1830).

1. Sistem tanam bebas harus diubah menjadi tanam wajib dengan jenis tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya sedikit serta pelaksanaannya yang sulit.
3. Pajak terhadap tanah harus dibayar dengan menyerahkan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial.

Tanam paksa sendiri diterapkan secara perlahan mulai tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan sepenuhnya di Jawa. Bagi pemerintah kolonial (Belanda), Sistem Tanam Paksa menuai sukses besar. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak hanya dapat membangun sendiri, tapi punya hasil (laba) bersih 823 juta gulden untuk kas yang dikirim ke Kerajaan Belanda.

Aturan dan isi Tanam Paksa - Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada dasarnya adalah gabungan dari sistem pajak tanah (Raffles) dan sistem tanam wajib (VOC). berikut Isi Tanam Paksa:

1. Setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk *cultuurstelsel* (Tanam Paksa) yang luasnya tidak lebih 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor.
2. Waktu untuk menanam Sistem Tanam Paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan

3. Tanah yang disediakan terhindar (bebas) dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
4. Rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pengangkutan atau di pabrik-pabrik milik pemerintah kolonial selama seperlima tahun atau 66 hari.
5. Hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah Koloni. Apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak maka kelebihanannya harga akan dikembalikan kepada petani.
6. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan Sistem Tanam Paksa kepada kepala desa
7. Kegagalan atau Kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani seperti karena terserang hama atau bencana alam, akan di tanggung pemerintah Kolonial.

Pelaksanaan tanam paksa banyak menyimpang dari aturan sebenarnya dan memiliki kecenderungan untuk melakukan eksploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, Tanam Paksa menimbulkan akibat yang bertolak belakang bagi Bangsa Indonesia dan Belanda, diantaranya sebagai berikut.

#### Bagi Indonesia

1. Beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi serta membayar pajak .
2. Sawah ladang menjadi terbenkkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
3. Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana.
4. Kemiskinan yang makin berat.
5. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor.
6. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru.

#### Bagi Belanda

1. Kas Negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi.
2. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja (Surplus).
3. Hutang-hutang Belanda terlunasi.
4. Perdagangan berkembang pesat.
5. Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.

Tanam paksa yang berakibat banyak hal negatif bagi bangsa Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun Indonesia. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (*Agrarische Wet*), 1870.

Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Sistem ekonomi liberal untuk menggantikan Sistem Tanam Paksa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang kebijakan ini adalah: (1) pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi namun memberikan keuntungan besar bagi Pemerintah Kerajaan Belanda, (2) berkembangnya faham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri sehingga sistem Tanam Paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan, (3) kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya (Indonesia), dan (4) adanya Traktat Sumatera, 1871, yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

Pelaksanaan politik ekonomi liberal ini dilandasi dengan beberapa peraturan sebagai berikut.

1. *Indische Comptabiliteit Wet*, 1867.
2. *Suiker Wet*
3. *Agrarische Wet* (Undang-undang Agraria), 1870.
4. *Agrarische Besluit*, 1870.

Dalam melaksanakan kebijakan ekonomi liberal, sejak tahun 1870 di Indonesia diterapkan Imperialisme Modern (*Modern Imperialism*). sejak tahun tersebut di Indonesia telah diterapkan *Opendeur Politiek* yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-Modal swasta asing. Disamping modal swasta Belanda sendiri, modal swasta asing lain juga masuk ke Indonesia, seperti modal dari Inggris, Amerika, Jepang dan Belgia. Modal-Modal swasta asing tersebut tertanam pada sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah dan minyak. Sehingga perkebunan-perkebunan dibangun secara luas dan meningkat pesat.

Akibat sistem politik liberal kolonial adalah:

Bagi Belanda :

1. Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.
2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Pada tahun 1870 luas tanah di pulau Jawa yang ditanami tebu seluas 54.176 *bahu*, maka dalam tahun 1900 meningkat menjadi 128.301 *bahu*.
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

Bagi rakyat Indonesia :

1. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk
2. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula membawa akibat buruk bagi penduduk. Uang sewa tanah dan upah pekerja menurun.
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyak barang-barang impor dari Eropa.
5. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api.
6. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan *Poenale Sanctie*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, H.M. Nasrudin. 2008. *Bangsa Inlander, Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*. Yogyakarta: LkiS.
- Djoened P., Marwati, et al. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta : Depdikbud.
- Moedjanto, G. 1992. *Indonesia Abad 20, Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Multatuli. 2015. *Max Havelaar*. Yogyakarta: Narasi.
- Niel, Robertt van. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.

- Ricklefs, M.C.,1988. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rocher, Jean. 2011. *Perang Napoleon di Jawa 1811*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Romein, Jan. 1989. *Dalam Pesona Prambanan*. terj. Hazil Tanzil. Jakarta: Grafiti dan KITLV.
- Tjondronegoro, Sediono M.P dan Gunawan. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: YOI dan Gramedia.